



Xi Jinping “Impian China” dan Diplomasi Militer China ke ASEAN

(Xi Jinping’s “Chinese Dream” and China’s Military Diplomacy to ASEAN)

Ammala Phongphaekham
Ministry of National Defense of Lao PDR
International Student, Republic of Indonesia Defense University
amthilina19@gmail.com

Abstrak

Kebangkitan Xi Jinping telah menyatukan gagasan 'Impian China' sebagai kebangkitan besar Cina. Karena mimpi itu mengacu pada semangat nasionalisme 'abad penghinaan,' telah menjadikan masalah keamanan nasional sebagai inti dari Cina diplomasi. Sementara kebijakan luar negeri terkait keamanan nasional telah meningkatkan peran militer dalam pembuatan kebijakan luar negeri China, itu membawa konsekuensi bagi China sikap yang lebih keras dalam melindungi keamanan nasional China. Namun, Xi Jinping gagasan menggunakan diplomasi militer telah memulai hubungan yang tidak nyaman antara China dan beberapa negara ASEAN yang menghasilkan 'negosiasi berkelanjutan tanpa kemajuan' untuk sengketa Laut Cina Selatan. Penelitian ini mengkaji dampak dari militer peran yang semakin besar dalam inisiatif kebijakan luar negeri Xi Jinping hingga diplomasi militernya di ASEAN. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemimpinan dan visi Xi Jinping tentang Tiongkok Dream, yang menggunakan diplomasi militer sebagai alat utama untuk memajukan keseluruhannya tujuan diplomatik, telah dilihat sebagai tanda tumbuhnya ketegasan.

Kata kunci: *Xi Jinping, militer, pembuatan kebijakan luar negeri, keamanan nasional, militer diplomasi, Laut Cina Selatan, ASEAN*

Abstract

Xi Jinping’s rise has unified the notion of the ‘China Dream’ as China’s great rise. Because the dream refers to the spirit of nationalism of the ‘century of contempt,’ it has made the issue of national security the core of China’s diplomacy. While foreign policy related to national security has increased the military’s role in China’s foreign policy-making, it has a consequence for China to take a stricter stance in protecting China’s national security.



However, Xi Jinping's notion of using military diplomacy has started an uneasy relationship between China and several ASEAN countries resulting in 'continuous negotiations without progress' for the South China Sea disputes. This research examines the impact of the military's increasing role in Xi Jinping's foreign policy initiatives on his military diplomacy in ASEAN. The results show that Xi Jinping's leadership and vision of the China Dream, which uses military diplomacy as the primary tool to further his overall diplomatic goals, has been seen as a sign of growing assertiveness.

Keywords: Xi Jinping, military, foreign policy making, national security, military diplomacy, South China Sea, ASEAN

1. Pendahuluan

Kebangkitan Xi Jinping sejak 2012 telah menyebabkan transformasi di dalam negeri China dan kebijakan luar negeri. Beberapa diskusi mengangkat bahwa hubungan internasional China di bawah kepemimpinan Xi Jinping lebih tegas, proaktif, dan nasionalistis dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Beberapa ulama berpendapat bahwa perubahannya adalah keberangkatan dari kebangkitan damai Tiongkok sebelumnya. Ciri khas kepemimpinan Xi Jinping adalah China Dream yang sudah mapan sejak pertama kali memerintah. Xi Jinping mengacu pada mimpi sebagai peremajaan nasional. Cara China mengejar mimpinya, implikasinya, mengubah sistem diplomatiknya. Sementara mimpi itu tidak spesifik tentang kebangkitan militer, Namun, di hari-hari berikutnya, China Dream pertama kali ditekankan pada gagasan yang kuat militer. Dengan demikian, kebijakan luar negeri China berfokus pada masalah keamanan nasional, yang pada Ujungnya, memberikan peran yang lebih berpengaruh bagi militer untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Namun, Xi Jinping masih mengkhawatirkan kebijakan luar negeri negaranya, strateginya tidak bisa terpisah dari kepentingan domestik Xi dan terkait erat dengan perkembangan China diplomasi militer, yang telah berkembang sejak berakhirnya Perang Dingin.

Kajian ini membahas tentang efek peredam peran yang semakin besar dalam pembangunan kebijakan luar negeri Tiongkok di bawah Xi Jinping melalui diplomasi



ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Sementara perkembangan ini berhubungan erat Untuk pengembangan diplomasi militer China, ASEAN sangat penting untuk dilihat sebagai China diplomasi militer menempatkan Asia Tenggara sebagai prioritas di Asia. Secara bersamaan, Cina Selatan Sengketa laut yang menempatkan ASEAN dan China di meja yang sama masih berlangsung dan tidak akan berakhir. Di Dari pengamatan, penelitian ini menguraikan dampak dari visi Xi Jinping tentang 'Strong Army Dream' ke negara-negara ASEAN dengan tiga critical section. Sketsa pertama esai tentang kebangkitan Xi Jinping dan gagasan Impian Tentara Kuat dan bagaimana hal itu berkontribusi pada peran militer dalam pembuatan kebijakan luar negeri China. Kedua, penelitian tersebut menilai mengapa militer China semakin terlibat dalam keputusan kebijakan luar negeri di bawah Presiden Xi Jinping. Terakhir, dampak dari meningkatnya peran militer terhadap diplomasi militer China, terutama terhadap ASEAN, akan dijelaskan lebih lanjut.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Bangkitnya Xi Jinping dan Impian Tentara yang Kuat

Pada 15 November 2012, Xi Jinping terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok ("Keterangan pada kesempatan rapat", 2012). Sejak awal pemerintahannya, Xi menandai kepemimpinan barunya dengan mengungkapkan China Dream/Zhongguo Meng. Ini mencakup empat hal penting, yaitu Kuat Cina (ekonomi, politik, diplomatik, ilmiah, dan militer), China beradab (kesetaraan dan keadilan, budaya yang kaya, moral yang tinggi), Cina Harmonis (persahabatan antar kelas sosial), dan Cina yang indah (lingkungan yang sehat dan sedikit polusi) (Kuhn, 2013). Xi mengacu pada mimpi sebagai semangat nasionalisme penderitaan Cina di 'abad penghinaan' (Miller, 2013) dan Kemuliaan Tiongkok di bawah pemerintahan partai ("Orang Tionghoa dan Xi Jinping", 2013).

China Dream sejak itu telah diulang beberapa kali, termasuk pada pertemuan penutupan Kongres Rakyat Nasional pada 17 Maret 2013, saat pelantikan Xi Jinping



sebagai presiden (Xinhua, 2013). Xi berjanji untuk memenuhi impian itu melalui "menyebarkan semangat Tionghoa, memadukan kebanggaan nasional dengan patriotisme, dan modernitas dengan reformasi" (Yin, 2013). Xi Jinping menegaskan ide China Dream sebagai 'kebangkitan nasional' dan tujuan kekuatan dunia China. Namun, ide ini bukanlah hal baru sebagai sebuah buku berjudul "China Dream: Pemikiran Kekuatan Besar dan Posisi Strategis Tiongkok di Era Pasca-Amerika", diterbitkan pada tahun 2010, menyerukan kebangkitan semangat militer China (Miller, 2013). Pandangan lain menunjukkan bahwa China Dream Xi adalah tanggapan terhadap kolom Thomas Friedman di Times tahun 2012 berjudul "China Needs Its Sendiri Dream" yang mengharapkan "a new Chinese mimpi yang mengawinkan harapan kemakmuran rakyat dengan Tiongkok yang lebih berkelanjutan" ("Xi Jinping dan Cina", 2013).

China Dream telah dianggap sebagai kebangkitan besar China, tidak hanya di lingkup domestik tetapi juga dalam hubungan eksternalnya. Seperti yang dikemukakan oleh Cameron (2013), karya Xi Jinping desakan pada 'kebangkitan nasional' mengirimkan pesan bahwa China melanjutkan tempatnya di dunia. Keduanya 'kebangkitan nasional' dan tujuan China untuk menjadi kekuatan dunia terkait. Seperti yang dikemukakan oleh Zicheng, Levine dan Liu (2011), "ada hubungan erat antara peremajaan Cina bangsa dan keinginan China akan kekuatan dunia. Jika China tidak menjadi kekuatan dunia, peremajaan bangsa Cina tidak akan lengkap. Hanya ketika itu menjadi kekuatan dunia dapatkah kita mengatakan bahwa peremajaan total bangsa Tiongkok telah tercapai."

Akibatnya, pada Konferensi Pusat tentang Pekerjaan Terkait Luar Negeri pada November 2014, Xi Jinping mengusulkan memajukan diplomasi multilateral dengan tujuan mereformasi sistem internasional dan tata kelola global, serta meningkatkan perwakilan Tiongkok dan negara berkembang lainnya ("Konferensi Pusat tentang Pekerjaan," 2014). Xi mengumumkan perkembangan baru dalam kebijakan luar negeri China pada pertemuan puncak Partai Komunis China (PKC) tentang hubungan luar negeri. Dia secara resmi menetapkan perubahan barunya dalam kebijakan luar negeri,



menandai sebuah transformasi dari diktum Deng Xiaoping tentang 'menjaga profil rendah' ke strategi 'aktif dan kreatif'

Xi Jinping memusatkan kepemimpinannya pada nasionalisme, patriotisme, dan kebanggaan (Shi dan Tweed, 2014). Menurut Huang (2013), Xi Jinping menyadari bahwa nasionalisme adalah konsep yang kuat dalam masyarakat China, terutama untuk mendapatkan dukungan dari konstituen nasionalisnya di dalam militer ("Xi Jinping and the Chinese," 2013). Reformasi militer telah menjadi agenda peremajaan Tiongkok sejak Kongres Nasional PKT tahun 2012. In Desember 2012, ketika Xi Jinping memeriksa instalasi angkatan laut di Militer Guangzhou Daerah, dia menekankan militer yang kuat untuk mencapai peremajaan nasional (Miller, 2013).

Ini penekanan membuka jalan bagi gagasan Impian Tentara yang Kuat. Selain itu, kepatuhan yang kuat dengan perintah partai juga diharuskan menjadi 'semangat tentara yang kuat' ("Xi Jinping dan Cina", 2013). Setelah ini, pada bulan Juni 2013, tentara menegaskan bahwa "Impian China adalah Impian Tentara Kuat, Impian Tiongkok memimpin Impian Tentara Kuat, dan Tentara Kuat Dream mendukung China Dream" ("Xi Jinping – China Dream", n.d). Sementara itu tetap menjadi terlihat, konsep Strong Army Dream menjanjikan untuk menjadi kekuatan penuntun dalam kebijakan militer China (Miller, 2013).

Tahun 2015 menandai kesempatan pertama dalam sejarah Tiongkok, Tiongkok secara terbuka mengungkapkan Militer Tiongkok Buku Putih Strategi, perubahan dari Pertahanan Nasional China sejak tahun 1998. Buku putihnya adalah penting karena mengungkapkan pergeseran strategis Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Pertama, itu menguraikan strategi 'pertahanan aktif' dan menekankan komitmen China untuk 'menang' perang lokal yang terinformasikan' (Kania, 2015). Kedua, menekankan tujuan menjadi kekuatan maritim dan kehadiran angkatan laut China yang lebih signifikan lebih jauh dari Rakyat Pantai Republik (Gady, 2015). Ada empat domain utama untuk pengembangan kekuatan China di buku putih baru: dunia maya, luar angkasa, kekuatan nuklir, dan akhirnya, lautan (Chang, 2015). Oleh karena itu, pada bulan Desember 2015,



komando umum PLA, Pasukan Roket PLA, dan Pasukan Dukungan Strategis PLA diumumkan secara resmi (Liu Hui, 2019).

China Dream Xi Jinping tidak spesifik tentang kebangkitan militer. Namun, peremajaan nasional untuk mendapatkan kembali tingkat “kemakmuran dan kekuasaan yang dinikmati sebelum periode penghinaan nasional yang membutuhkan pemerintahan yang efektif, ekonomi yang makmur, a masyarakat yang harmonis, dan militer yang kuat” (Miller, 2013). Namun, di hari-hari berikutnya, China Dream pertama kali ditekankan pada gagasan 'militer yang kuat'. Oleh karena itu, China kebijakan luar negeri lebih fokus pada masalah keamanan nasional dalam kebijakan luar negeri China, yang di pada akhirnya, memberikan peran yang lebih berpengaruh bagi militer untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri. China membentuk Komisi Keamanan Nasional (NSC), dipimpin oleh Xi Jinping, Perdana Menteri Li Keqiang, dan Ketua Kongres Rakyat Nasional, Zhang Dejiang (Zhang, 2015). Komisi baru tampaknya memecahkan masalah fragmentasi di luar negeri China pembuatan kebijakan. Xi mencoba membuat terobosan dengan menempatkan dirinya sebagai pusat dari yang baru kepemimpinan dan meninggalkan gaya 'kepemimpinan kolektif' yang dijunjung sejak Deng Xiaoping (“Kekuatan Xi”, 2014).

Kebangkitan Xi Jinping dapat dianggap sebagai titik balik dalam kebijakan luar negeri terkait keamanan nasional China. Menurut Zheng dan Liu (2015), keamanan nasional termasuk nasional kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan wilayah, jiwa dan harta benda rakyat, negara sistem politik, pembangunan ekonomi, dan stabilitas sosial. Akibatnya, Xi Jinping pemerintah bersikap tegas terhadap sengketa teritorial atau kedaulatan. Ketika kebijakan luar negeri terkait keamanan nasional menjadi lebih penting, peran PLA dalam pembuatan kebijakan luar negeri China menjadi lebih berpengaruh. Terminologi PLA unik karena tidak tentu mengacu pada tentara Cina, tetapi seluruh angkatan bersenjata atau militer. Awalnya, PLA terdiri dari pasukan darat, angkatan laut yang disebut Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN), dan



angkatan udara yang disebut Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLAAF). Oleh karena itu, Xi Jinping penekanan pada Strong Army Dream mengacu pada PLA atau militer. Seperti yang dikatakan Ji (2014a), “the Peran PLA dalam kebijakan luar negeri China adalah integral dan mendalam.” Juga, Ji (2014b) menyebutkan bahwa Peran PLA dalam pembuatan kebijakan ini adalah kunci dalam memahami diplomasi China. Bagian selanjutnya menyoroti peran militer yang lebih aktif dalam pembuatan kebijakan luar negeri China di bawah Xi Jinping.

2.2. Peran Militer dalam Kebijakan Luar Negeri China di bawah Xi Jinping.

Cina memiliki jalur ganda sistem pengambilan keputusan, jalur partai dan jalur negara. Itu jejak partai masih lebih tinggi dari negara (Jakobson dan Manuel, 2016). Oleh karena itu, partai adalah pusat pembuatan kebijakan luar negeri China. Badan pembuat keputusan tertinggi, termasuk masalah kebijakan luar negeri, adalah Komite Tetap Politbiro PKC (Gore, 2013). Seperti yang diperdebatkan oleh Jakobson dan Manuel (2016), “hampir semua anggota badan yang ditugasi melaksanakan kebijakan apa pun adalah anggota pertama dan terpenting dari BPK.” Hanya kelompok elit PKC terdiri dari tujuh anggota yang berasal dari 25 anggota politbiro. Akibatnya, 'kementerian luar negeri' PKC, yang disebut Departemen Internasional Pusat (CID), lebih tinggi dari Kementerian Luar Negeri (Gore, 2013).

Peran Kementerian Luar Negeri dalam pembuatan kebijakan luar negeri China bukanlah menentukan, tetapi berbagi tanggung jawab dengan Komisi Militer Pusat/CMC (Ji, 2014a). Karena posisi partai lebih dominan daripada negara, peran Asing Kementerian Urusan di Cina lebih lemah dari negara-negara lain di dunia (Jakobson dan Manuel, 2016). Kementerian bertanggung jawab atas urusan luar negeri secara umum dan hubungan antar pemerintah. Namun, seperti yang dikemukakan oleh Gore (2013), “peran utama Kementerian Luar Negeri adalah implementasi dari kebijakan yang dibuat di tempat lain,” bahkan bukan sebagai koordinasi badan yang masih di bawah partai atau yang disebut Pimpinan Pusat Luar Negeri PKC Kelompok kecil. Oleh karena itu,



Gore (2013) menggambarkan posisi menteri luar negeri sebagai “jalan turun” perintah kekuasaan PKC.”

Sedangkan sipil bertanggung jawab atas diplomasi sehari-hari, keamanan atau yang berhubungan dengan militer urusan luar negeri adalah domain militer (Ji, 2014b). Militer memiliki otonomi yang dapat mempengaruhi politik luar negeri. Otonomi tidak dapat dipisahkan dari hubungan historisnya dengan partai komunis, khususnya di masa perang, ketika kekuatan PKC terutama bergantung pada kekuatan militer (Song, 2008). Oleh karena itu, seperti yang dikemukakan oleh Jakobson dan Manuel (2016), “kepemimpinan partai menjunjung tinggi sistem pengambilan keputusan yang membuat militer tetap waspada panjang dari pengambilan keputusan politik.” Sementara PLA berada di bawah partai, itu adalah akhirnya sayap bersenjata partai, bukan negara, di mana partai mengontrol penggunaan kekuatan. Akibatnya, pemerintah tidak dapat mendikte militer karena memiliki banyak statusnya lebih tinggi dari Kementerian Luar Negeri (Gore, 2013). Tidak mengherankan, kebijakan luar negeri dapat dilakukan tanpa koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

Ada tiga saluran di mana militer memainkan bagian integral dari Cina pembuatan kebijakan luar negeri: Komisi Militer Pusat (CMC), Politbiro, dan Memimpin Kelompok Kecil/LSG (Grieger, 2015). CMC adalah badan terkenal di bawah partai yang bertujuan untuk mengendalikan PLA. Sekretaris Jenderal PKC juga adalah Ketua CMC. Selanjutnya, sebagai Ketua CMC, Xi Jinping mewakili kepentingan PLA dan kebijakan luar negeri pandangan di Komite Tetap Politbiro, karena tidak ada perwakilan militer di dalam lingkaran Politbiro (Grieger, 2015). Terakhir, ada Leading Small Groups (LSGs) di Sistem pengambilan keputusan China yang dapat disalurkan sebagai kendaraan bagi PLA untuk memberi makan proses politik luar negeri. Namun, LSG hanya bersifat penasihat, dengan keputusan akhir dalam Komite Tetap Politbiro.



Keberadaan LSG menjadi ciri khas China. Kelompok-kelompok kecil ini mencakup masalah apa pun dari ekonomi, Olimpiade 2008, gempa bumi Sichuan 2008, dan luar negeri urusan. LSGs memainkan peran penting dalam mendukung proses pembuatan kebijakan. Bahkan lebih penting daripada kementerian (Huang, 2014). Namun, LSG telah lama berperan dalam Struktur kekuasaan China sejak tahun 1958, terdiri dari para pemimpin yang paling kuat dan berpengaruh. Xi Jinping adalah salah satu pemimpin yang sudah terlibat dalam LSG. Pada pertengahan 2012, dia adalah seorang senior pemimpin di LSG tentang keamanan maritim, atau yang disebut perlindungan hak maritim (**Jakobson dan Manuel, 2016**).

Ketika Xi Jinping diangkat sebagai Sekretaris Jenderal PKC pada tahun 2012, ia memperkenalkan tim kebijakan luar negeri yang baru. Xi adalah anggota pertama Politbiro, bersama dengan Perdana Menteri Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan, dan Zhang Gaoli. Sementara Li Keqiang adalah anggota Komite Tetap Biro Politik Komite Sentral Partai Ketujuh Belas, orang-orang yang tersisa adalah anggota Politik Biro Komite Sentral Partai Ketujuh Belas (china.org.cn, 16 November 2012). Ketika sistem pengambilan keputusan partai bersifat hierarkis, mau tidak mau, Xi memiliki pengaruh signifikan dalam proses politik luar negeri. Xi kemudian mengambil alih dengan memimpin LSG paling berpengaruh, seperti Urusan Taiwan dan urusan luar negeri. Karena 'semakin kuat kepala LSG, semakin banyak LSG terlihat kuat,' keterlibatan Xi dalam urusan luar negeri membuat LSG. LSG adalah LSG yang paling kuat (**Jakobson dan Manuel, 2016**).

Di satu sisi, pembentukan LSGs secara umum diterima sebagai tanda utama pergeseran politik. Di sisi lain, keputusan Xi Jinping untuk mendirikan dan memimpin dua LSG baru (Pendalaman Komprehensif Komite Reformasi dan Keamanan Nasional) tampaknya mengkonfirmasi nya tekad kuat untuk kebijakan keamanan luar negeri dan nasional China. Seperti yang dikemukakan oleh Huang, Xi adalah pemimpin yang sangat berbeda dari pendahulunya, Hu Jintao, karena "Gaya Xi lebih seperti apemimpin orang

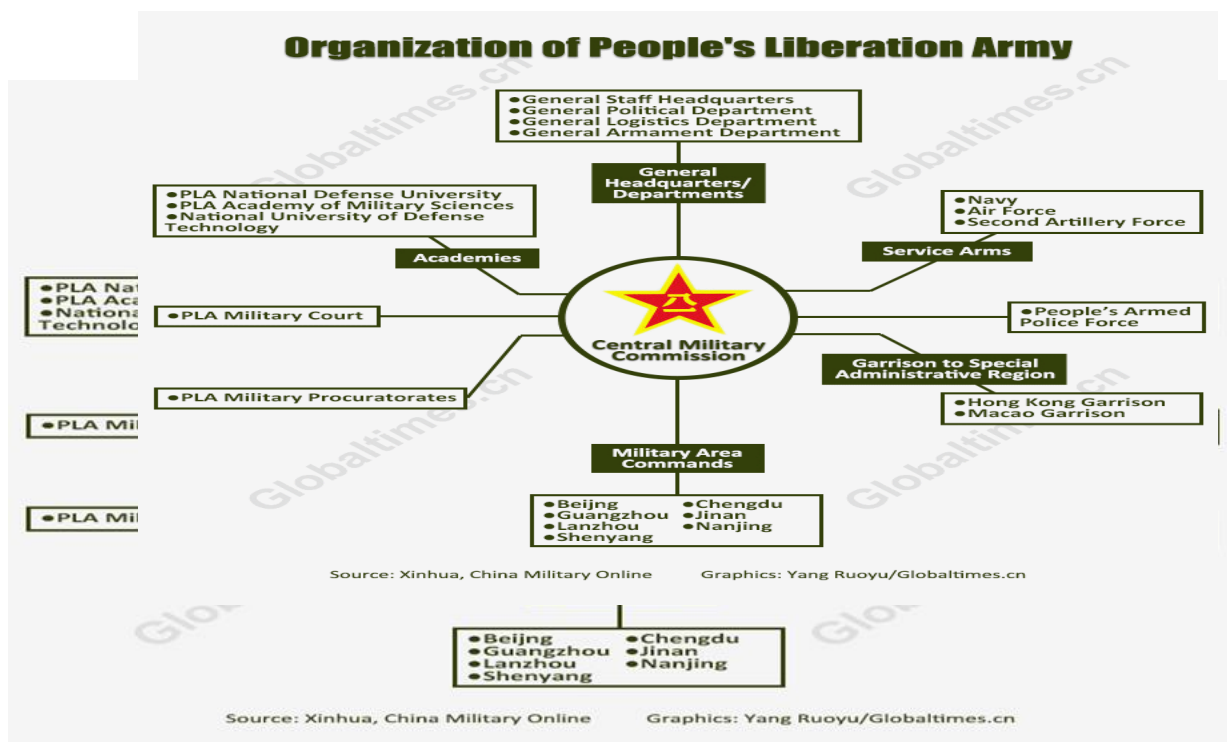


kuat” (Huang, 2013). Namun, penekanan Xi pada urusan keamanan nasional tidak bisa terlepas dari keinginannya untuk mencapai China Dream. Untuk itu, dia akan mempertahankan menentukan peran PLA karena merupakan pilar penting dari kekuatan PKC.

Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pembuatan kebijakan luar negeri di China dibagi antara sipil dan militer. Padahal, keutamaan masih berada di bawah sipil (Ji, 2014a). Itu tidak bisa dipisahkan dari indoktrinasi PKC tentang 'kontrol partai mutlak' dan subordinasi PLA yang mengatur hubungan sipil-militer atas urusan luar negeri. Konsensus antara PLA dan PKC untuk memprioritaskan masalah domestik dan penghindaran perang telah memungkinkan PLA untuk dengan sengaja mendukung kebijakan luar negeri sipil pada tingkat strategis. Sedangkan kepentingan sipil-militer tentang penghindaran perang di bawah Xi Jinping tetap tidak berubah, seperti yang dikemukakan oleh Ji (2014a), Xi memperketat 'sikap proaktif tetapi latihan kekuatan keras yang hati-hati.' Akibatnya, China tampaknya bergerak strategi pertahanannya hingga persiapan perang. Pada bulan April 2016, tidak mengherankan, Xi Jinping berjudul dirinya sebagai panglima tertinggi dari pusat komando pertempuran bersama dan, pada saat yang sama, didesak untuk membangun sistem komando militer yang 'mampu memenangkan perang' (Ramzy, 2016).

Ketika peran militer dalam kebijakan luar negeri terkait keamanan nasional China tumbuh, itu mempengaruhi kebijakan luar negeri China. Pertama, persuasi PLA dan dukungan penuh untuk perubahan telah meyakinkan Xi Jinping untuk melakukan pendekatan yang lebih ketat untuk melindungi keamanan nasional China. Ji (2014a) berpendapat bahwa PLA secara fungsional berfungsi sebagai landasan dan alat asertif politik luar negeri, pekerjaan yang diberikan oleh partai. Karena Xi Jinping ingin mendefinisikan kepemimpinannya dengan menegaskan kembali dan menjaga sengketa wilayah maritim, khususnya di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Selatan Timur, mereka datang sebagai kepentingan inti dari kebijakan luar negeri Cina.

Akibatnya, China harus mengubah strategi keamanan pertahanannya dari hanya pertahanan darat ke pertahanan darat dan laut (Zheng dan Liu, 2015). Untuk waktu yang lama, China memproyeksikan postur pertahanannya dalam strategi berbasis terestrial. Menurut Ji (2014a), “PLA postur kontinental pertahanan defensif cocok dengan diplomasi yang berpusat pada status quo warga sipil dengan tetangga darat.” Sebelumnya, bagian dari empat departemen umum bertanggung jawab untuk mengelola pasukan darat. Namun, sekarang mereka terintegrasi menjadi pemimpin PLA baru organ. PLA memangkas jumlah tentara daratnya menjadi kurang dari 50 persen dari angkatan bersenjata pasukan, dengan 18 pasukan kelompok sebelumnya direorganisasi menjadi 13 pasukan baru (Liu Hui, 2019).



Source: Xinhua, China Military Online Graphics: Yang Rouyu/Global Time

Oleh karena itu, sejak Xi Jinping berusaha menjaga keamanan nasionalnya melalui jalur maritim sengketa wilayah, Xi Jinping berupaya meningkatkan peran Angkatan Laut. Terbukti, Xi Jinping mengumumkan ide awal Impian Tentara Kuat dalam instalasi angkatan laut di Guangzhou Kawasan Militer pada tahun 2012. Akibatnya,



perkembangan tersebut membuat kebijakan luar negeri China menjadi tegas untuk melindungi hak-hak maritimnya, sementara pada saat yang sama, ia telah mengubah PLA Angkatan Laut menjadi 'blue water navy' yang secara aktif terlibat dalam strategi pertahanan aktif China (Poulin, 2016). Apakah insiden tersebut dapat dilihat dalam konteks keaktifan PLA Navy strategi pertahanan, sangat penting untuk mempertimbangkan kapal angkatan laut China melakukan latihan dengan menyeberang Jalur komunikasi laut Indonesia tanpa pemberitahuan sebelumnya pada Mei 2016. PLA Navy berlayar dari Pulau Hainan melalui Laut Cina Selatan, melintasi dua kepulauan Indonesia alur laut (Alur Laut Kepulauan Indonesia), Selat Karimata, Sunda, dan Lombok Selat, Selat Makassar, Samudra Pasifik di dekat bagian timur Filipina dan Kembali ke Pulau Hainan (Patriardjawane, 2016). Angkatan Laut PLA melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 di mana Cina menjadi bagian dari konvensi ini, sebagaimana telah diatur bahwa "persyaratan transit yang terus menerus dan cepat tidak menghalangi jalan melalui selat untuk masuk, keluar atau kembali dari suatu negara yang berbatasan dengan selat itu, dengan tunduk pada syarat-syarat masuk ke negara bagian itu" (pasal 38).

Kedua, peran PLA yang berkembang dalam pembuatan kebijakan luar negeri terkait keamanan nasional telah membuat strategi keamanan China tampak hanya sebagai 'keputusan militer taktis' (Ji, 2014a). Sebagai Dijelaskan sebelumnya, sipil dan militer telah berbagi tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan luar negeri, antara diplomasi publik dan urusan luar negeri terkait keamanan nasional. Namun, sebagai dikemukakan oleh Ji (2014a), dalam membahas masalah keamanan nasional, "perwira PLA tidak kurang masuk akal dan peka terhadap pertanyaan-pertanyaan penting tentang perang dan perdamaian dan ketertiban pertempuran." Sebagai ditunjukkan oleh kasus Undang-Undang Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) pada tahun 2013, yang mendorong oleh PLA ke Xi Jinping, AS telah menganggapnya sebagai perubahan strategis China. Akibatnya, AS memperdalam keterlibatannya dalam konflik Laut Cina Selatan Timur, dan pada akhirnya, itu berubah ketertiban keamanan di wilayah tersebut.



Beberapa faktor berkontribusi terhadap ketidakcocokan antara PLA dan warga sipil. Pertama dari semuanya, semakin pentingnya PLA dalam pemerintahan Xi Jinping telah membuat PLA pejabat tidak menganggap bahwa memberi tahu rekan-rekan sipil mereka tentang kebijakan luar negeri mereka adalah kewajiban seperti itu (Ji, 2014a). Seperti yang dikemukakan oleh Gore (2013), "militer jarang berkonsultasi diplomat tentang masalah kebijakan luar negeri, dan yang terakhir sering mendengar tentang tindakan militer kemudian." Akibatnya, kedua aktor tidak dapat menghindari diri dari masalah kurangnya koordinasi, yang pada akhirnya PLA mengambil keputusan tanpa persetujuan dari warga sipil. Selain itu, sementara PLA memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Xi Jinping dengan semakin pentingnya kebijakan luar negeri terkait keamanan nasional, mau tidak mau, PLA memiliki yang lebih besar dan lebih pribadi pengaruhnya terhadap Xi Jinping. Menjelang akhir ini, ada kemungkinan bahwa kebijakan luar negeri China adalah masalah kepentingan yang berbeda antara aktor domestik, bukan grand design China yang samar (**Jakobson dan Manuel, 2016**).

Sementara PLA memiliki peran penting dalam membentuk dan mengimplementasikan asing Cina kebijakan, sejauh mana gagasan *Strong Army Dream* berdampak pada militer Cina diplomasi ke mitra regionalnya sangat penting untuk dilihat, terutama ke negara-negara ASEAN. Seperti yang kita tahu, diplomasi militer China telah menempatkan Asia Tenggara sebagai prioritasnya di Asia (**Allen, Saunders, dan Chen, 2017**).

3. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Teknik tersebut dilakukan melalui studi kasus yang menggunakan teori-teori untuk mengkaji dan menjawab pertanyaan penelitian. Metode kualitatif, seperti yang didefinisikan oleh Cresswell (1998), adalah proses penyelidikan berdasarkan tradisi metodologis beragam penyelidikan yang menyelidiki masalah sosial atau manusia. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan membuat analisis sebagai perspektif menyeluruh dari laporan.

4. Hasil dan Diskusi

4.1. Dampak Diplomasi Militer China: Negara-negara ASEAN di Inti.

Pada akhir Perang Dingin, China telah mengakui diplomasi militer sebagai hal yang kritis komponen dari hubungan luar negeri secara keseluruhan. Dalam arti luas, Cina mencirikan militer diplomasi sebagai “hubungan eksternal yang berkaitan dengan militer dan urusan terkait antara negara dan kelompok negara, termasuk pertukaran personel militer, militer negosiasi, negosiasi kontrol senjata, bantuan militer, kerjasama intelijen militer, militer kerjasama teknologi pemeliharaan perdamaian internasional, kegiatan aliansi militer, dan sebagainya.” (Allen, Saunders, dan Chen, 2017). China melakukan diplomasi militernya baik secara bilateral maupun multilateral. Namun, seperti yang dikatakan Allen, Saunders, dan Chen (2017), sebagian besar dari Diplomasi militer China bersifat bilateral, tetapi PLA sekarang berpartisipasi dalam berbagai multilateral pertemuan, konferensi, latihan, dan kompetisi. Sebagai instrumen politik luar negeri, diplomasi militer dilakukan secara top-down dan dibagi antara pihak dan militer. Sementara Komite Sentral PKC mendikte tujuan kebijakan luar negeri yang luas, CMC menentukan aktivitas spesifik untuk berbagai bagian PLA. Hal ini terkait dengan fakta bahwa China diplomasi militer tunduk pada partai dan strategi diplomatik nasional dan kebijakan luar negeri (Cai, 2016).

Menurut Cai (2016), diplomasi militer sebagai kebijakan resmi pertama kali muncul di Buku Putih Pertahanan Nasional 1998. Dalam dokumen ini disebutkan, “Militer asing China kontak berada di bawah dan melayani modernisasi pertahanan nasional dan angkatan bersenjata pasukan. China bersikeras untuk menangani hubungan militer luar negerinya secara independen dan melibatkan dalam pertukaran dan kerja sama militer berdasarkan Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai. Dalam kontaknya dengan kalangan militer asing, China selalu menganjurkan prinsip-prinsip saling menghormati, meningkatkan pemahaman, mengembangkan persahabatan, saling menguntungkan, dan kerja sama. Angkatan bersenjata China telah aktif berpartisipasi dalam militer multilateral kegiatan diplomatik untuk membawa peran positif angkatan



bersenjata China ke dalam permainan penuh di bidang urusan militer internasional (Kebijakan Pertahanan Nasional, 1998). Sejak itu, hampir setiap dua tahun, Cina secara teratur menerbitkan kebijakan pertahanan nasionalnya. Pengecualiannya adalah pada tahun 2012 ketikam Cina menunda publikasi karena perubahan kepemimpinan internal. Pada tahun 2013, di bawah pemerintahan baru Xi Jinping, China menerbitkan kebijakan pertahanan nasionalnya dengan judul “Pekerjaan yang Beragam dari Angkatan Bersenjata China.” Ini adalah pertama kalinya Kebijakan Pertahanan Nasional disajikan dalam isu-isu spesifik seperti itu. Kemudian, pada tahun 2015, Tiongkok menerbitkan buku putih yang secara khusus disebut Strategi Militer China. Ini putih pertama makalah yang secara sistematis menguraikan misi militer China dan tugas-tugas strategis yang telah tidak pernah muncul sebelumnya dalam Kebijakan Pertahanan Nasional. Strategi Militer China 2015 Buku Putih menyatakan bahwa:

Mentalitas tradisional bahwa daratan melebihi laut harus ditinggalkan, dan hebat pentingnya harus dilampirkan untuk mengelola laut dan samudera dan melindungi maritim hak dan kepentingan. China perlu mengembangkan militer maritim modern struktur kekuatan yang sepadan dengan keamanan nasional dan kepentingan pembangunannya, menjaga nasional dan hak dan kepentingan maritimnya, melindungi keamanan Strategi SLOC dan kepentingan luar negeri, dan berpartisipasi dalam maritim internasional kerjasama, sehingga memberikan dukungan strategi untuk membangun dirinya menjadi kekuatan maritim (**Xinhua, 2015**).

Yang terbaru adalah pada Juli 2019 ketika China mengeluarkan Pertahanan Nasional China di Zaman Baru. Sebagaimana dinyatakan, kebijakan pertahanan negara ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci praktik, tujuan, dan pentingnya pertahanan nasional China dan upayanya untuk membangun militer yang kuat (Erickson, 2019). Namun, Kebijakan Pertahanan Negara 2019 memiliki penekanan yang berbeda pada sifat kebijakan pertahanan negara yang defensif. Menurut Hui (2019), dinyatakan bahwa “militer China peran telah bergeser ke arah menjaga kepentingan luar negeri China dan perdamaian internasional. Modernisasi militer China adalah yang utama untuk menjaga wilayah dan kedaulatannya, menolak tuduhan 'ancaman China'.



Buku putih itu juga mengakui kebutuhan China untuk melindunginya investasi dan warga negara di luar negeri di era baru” (**Erickson, 2019**). Fokus ini tidak bisa terpisah dari prioritas Xi Jinping untuk mengamankan proyek ambisiusnya di bawah Belt and Road Prakarsa.

Institute for National Strategic Studies pada tahun 2017 menerbitkan laporan berjudul *Chinese Diplomasi Militer, 2003-2016: Tren dan Implikasinya*. Dengan berfokus pada militer PLA diplomasi, laporan ini menunjukkan bahwa diplomasi militer PLA sangat menekankan pada Asia (41 persen). Dari persentase tersebut, Asia Tenggara memiliki prioritas tertinggi (22 persen), diikuti oleh Asia Selatan (9 persen), Asia Timur Laut (4,8 persen), dan Asia Tengah (5 persen). Itu indikasinya adalah penekanan kuat PLA pada kontak tingkat senior dengan Eropa dan negara-negara di Asia, terutama di subkawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Oleh karena itu, laporan ini juga menjelaskan bahwa peningkatan interaksi PLA dengan Asia tidak dapat dipisahkan dari AS 2011 strategi penyeimbangan kembali ke Asia dan kebangkitan Xi Jinping ke tampuk kekuasaan pada tahun 2012. Pernyataan ini terkait ke Strategi Militer China 2015: “Sebagai pusat gravitasi ekonomi dan strategis dunia bergeser semakin cepat ke kawasan Asia-Pasifik, AS melakukan 'penyeimbangan kembali' strategi dan meningkatkan kehadiran militernya dan aliansi militernya di wilayah ini.”

Namun, porsi yang lebih signifikan dari diplomasi militer China ke Asia Tenggara dan Asia Selatan bukanlah hal baru. Menurut Sachar (2004), sejumlah besar peralatan militer Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Myanmar dari China menunjukkan diplomasi militer sedang dikejar oleh Cina untuk menyeimbangkan India. Ini adalah upaya China dalam konteks regional untuk meminimalkan pengaruh India dengan mempersenjatai tetangganya dan membangun ikatan militer yang kuat dengan mereka. Akibatnya, ada hubungan militer yang kuat dan ketergantungan yang meningkat dari ini negara di Cina. Thailand dan Myanmar adalah dua negara ASEAN yang punya cerita Panjang diplomasi militer dengan China, terutama dalam hal transfer senjata pada pertengahan 1980-an (Sachar, 2004). Saat itu, China adalah satu-satunya sumber senjata bagi beberapa negara yang menghadapi sanksi yang disponsori AS, seperti Myanmar.



Hingga saat ini, Thailand masih mempertahankan China sebagai negara esensial sumber senjata (Story, 2019). Pada 2019, Thailand menandatangani kontrak dengan China State Shipbuilding Corporation (CSSC) untuk membangun kapal amfibi untuk Angkatan Laut Kerajaan Thailand (**“China untuk membangun pendaratan”**, 2019).

Tidak diragukan lagi, diplomasi militer China tumbuh dengan perkembangan China kebijakan luar negeri. Heydarian (2020) menemukan tiga fase penting dari kebijakan luar negeri China. Fase pertama adalah pada era Mao Zedong, di mana Cina terlibat secara berlarut-larut perang ideologis di 'lingkungan sekitar', terutama di Asia Tenggara. Lokal gerakan komunis mengandalkan dukungan material dan politik Beijing selama Perang Dingin fase awal. China di bawah Mao menolak tatanan internasional sebagai konstruksi illegal Kapitalis Barat sambil secara terbuka mendukung gerakan revolusioner di 'Dunia Ketiga'. Setelah perpecahan Sino-Soviet pada 1960-an, China meluncurkan perjuangan global melawan Barat (Amerika) dan Timur (Uni Soviet). Era ini membuat Cina menghadapi kekuatan besar dan mereka sekutu regional, termasuk Jepang dan rezim berorientasi Barat di Dunia Ketiga. Cai (2016) menegaskan bahwa China telah melakukan pertukaran militer dengan pasukan pertahanan asing di awal ini periode negara baru. Fase kedua adalah setelah kematian Mao Zedong pada tahun 1976 dan dia digantikan oleh Deng Xiaoping. Deng melakukan kunjungan diplomatik tingkat tinggi ke negara-negara penting di Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Amerika Serikat. China kemudian menormalkan hubungan dengan negara barat dan negara tetangga, seperti Jepang dan negara anggota ASEAN. Suka Mao, Deng masih melihat partisipasi aktif China dalam organisasi global yang dipimpin oleh Barat sebagai gangguan atau perangkap. Dengan kata lain, Deng hanya ingin terlibat dengan dunia luar sebagai selama itu membantu memperkuat pembangunan ekonomi negara. Oleh karena itu, menurut Yasuhiro (2006), China saat itu menunjukkan respon negatif terhadap kerjasama keamanan dengan Negara-negara Asia Tenggara: “Tiongkok dengan tradisi ‘tautan horizontal’ lebih memilih bilateral diplomasi dengan negara-negara kecil.” China baru saja mulai menargetkan ASEAN secara keseluruhan untuk dialog sekitar



tahun 1992 hingga 1993. Yasuhiro (2006) menjelaskan, tradisi 'tautan horizontal' berasal dari negara-negara berperang periode dinasti Cina. Seperti yang dijelaskan oleh sejarawan era Han Sima Qian, ada deskripsi 'tautan vertikal-tautan horizontal'. Sementara yang pertama menggambarkan sebuah kebijakan diambil oleh negara-negara kecil untuk bersekutu untuk menentang kekuatan besar, yang terakhir menghancurkan 'vertikal' link' dengan mencari perjanjian aliansi satu demi satu. 'Tautan horizontal' memenangkan perang dengan menggunakan metode membagi-dan-menaklukkan.

Fase ketiga dimulai oleh Jiang Zemin, yang melanjutkan cerita Deng Xiaoping kepemimpinan. Pada awal 1990-an, terjadi perubahan bertahap sebagai bentuk baru dari otoriter rezim di Beijing, yang disebut kepemimpinan kolektif 'negara-partai'. Ini terjadi setelah Insiden Tiananmen pada tahun 1989, yang mengguncang fondasi rezim komunis. Cina sistem politik secara dramatis menjadi plural, dengan kelas bisnis secara bertahap memasuki tingkat yang lebih tinggi dari Partai Komunis Tiongkok (PKT). Pada fase ini, industrialisasi domestik memacu China untuk mencoba membangun hubungan dengan negara lain, terutama untuk sumber mentah bahan, baik ke Afrika dan Amerika Latin. Selain itu, periode ini juga ditandai dengan migrasi jutaan warga Cina.

Akibatnya, China mulai memuji dirinya sebagai model pengembangan potensial untuk dunia pascakolonial. China mulai melihat dirinya sebagai kekuatan ekonomi baru dengan global minat. Joshua Ramo (2004) memberi nama 'Beijing Consensus' sebagai lawan dari Dunia Bank dan IMF, yang merupakan bagian dari Konsensus Washington. Konsensus Beijing adalah dicirikan oleh pendekatan non-ideologis, tanpa pamrih, pragmatis terhadap perdagangan dan investasi global. Dari Jiang Zemin hingga penggantinya Hu Jintao, Tiongkok memperkenalkan fase ketiga Tiongkok kebijakan luar negeri yang disebut 'pesona ofensif'. Pada periode ini, China tidak lagi pasif dan secara bertahap memainkan peran utama dalam mekanisme regional (Yasuhiro, 2006). Cina menggunakan Platform ASEAN Regional Forum (ARF) menjadi tuan rumah beberapa pertemuan regional. Sejak tahun 2001, frekuensi kehadiran menteri pertahanan meningkat, termasuk Pertahanan China–ASEAN Ministers' Meeting (ADMM) dan ADMM–Plus (Allen, Saunders, and Chen, 2017). Ketika ADMM adalah mekanisme



konsultatif dan kerjasama pertahanan tertinggi di ASEAN, ADMMPlus adalah platform untuk ASEAN dan delapan Mitra Dialognya, yaitu Australia, Cina, India, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat, untuk memperkuat kerja sama keamanan dan pertahanan untuk perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di Kawasan (asean.org, n.d).

Namun, Cai (2016) menggarisbawahi bahwa diplomasi pertahanan yang dikembangkan oleh ADMM-Plus memiliki konflik konseptual dengan diplomasi militer China. Meskipun militer China diplomasi masih berkembang, diplomasi militer China dapat didefinisikan sebagai "pengejaran" tujuan kebijakan luar negeri di bawah bimbingan strategi besar nasional China melalui penggunaan sumber daya dan kemampuan militer secara damai untuk mempertahankan kepentingan nasional (baik dalam dan luar negeri), keamanan, dan pembangunan", sedangkan diplomasi pertahanan adalah "a konsep keamanan tradisional yang digunakan untuk tujuan politik nyata untuk memperkuat sekutu Barat melawan musuh bersama" (Cai, 2016). Perbedaan kedua konsep tersebut terletak pada, untuk China sudut pandang yang diwakili oleh diplomat Cina Qian Qichen, bahwa "berkaitan dengan hubungan luar negeri, setiap angkatan bersenjata untuk mengkoordinasikan tindakan-tindakan diplomatik tidak dapat disebut sebagai diplomasi militer" (Cai, 2016).

Di bawah Xi Jinping, skeptisisme China berjalan seiring dengan beberapa perubahan di China kebijakan luar negeri. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, China memiliki tekad yang lebih besar untuk melindungi kepentingan intinya (Kamerun, 2013). Kepentingan nasional inti China telah mendorong kebijakan luar negeri China, dengan stabilitas politik dalam negeri terkait dengan kebijakan luar negeri. Kedaulatan, integritas wilayah, dan pertumbuhan sosial ekonomi jangka panjang adalah beberapa kepentingan dasar nasional. Selain itu, China menerapkan pendekatan yang lebih proaktif dan terkoordinasi di luar negeri pembuatan kebijakan (Zhang, 2015). Ada dua elemen dari pendekatan ini. Pertama, Cina berlaku 'desain tingkat atas' dalam pembuatan kebijakan luar negeri yang memungkinkan asing yang lebih terpusat proses kebijakan dan implementasi kebijakan luar negeri yang lebih efisien. Untuk pertama



kalinya sejak 1949, China mengadakan Konferensi Kerja tentang Diplomasi Periferal pada Oktober 2013. The konferensi tersebut melibatkan tujuh anggota Komite Tetap Politbiro, provinsi pemimpin, pejabat terkemuka dari berbagai departemen pemerintah pusat, militer, asing urusan, keamanan negara, lembaga keuangan, dan perusahaan milik negara utama. Dalam konferensi ini, Xi mendesak semua elemen untuk mengambil pendekatan yang lebih proaktif dalam memperkuat hubungan dengan tetangga Cina. Konferensi kerja ini diadakan setelah Xi Jinping mengumumkan visinya di Jalur Sutra Maritim (MSR). Kebangkitan MSR adalah visi besar asing China kebijakan dengan tetangga Eurasia periferanya (Heydarian, 2020). Menurut Heydarian (2020), sedangkan cara terbaik untuk memahami logika strategis visi BRI Xi Jinping adalah dengan melihat geografi kekuatan Cina, tetangga Eurasia periferalnya adalah kunci utama dari strategi keseluruhan.

Selain itu, Cina menerapkan 'pemikiran garis bawah', yang menetapkan 'garis merah' untuk tindakan yang ditoleransi oleh negara lain (Zhang, 2015). Akibatnya, China mengambil sikap yang lebih keras dalam sengketa wilayah khususnya di Laut Cina Selatan dan sengketa Laut Cina Timur. Bagi para cendekiawan Tiongkok, pendekatan Tiongkok yang lebih tegas, sebagian, adalah hasil dari posisi yang sebelumnya lebih moderat. Seperti yang dikemukakan Heydarian (2020), dalam konteks 'pesona' ofensif', kita dapat memahami mengapa China menandatangani Deklarasi Kode Etik (DoC) di 2002. Penandatanganan DoC pada masa Hu Jintao tidak lain adalah dipengaruhi oleh kepemimpinan Tiongkok saat itu dengan kebijakan 'serangan pesona'. Hu Jintao mencoba menjalin hubungan baik dengan negara-negara di kawasan dan memiliki pendekatan keamanan baru, 'damai' perkembangan'. Tidak hanya penandatanganan DoC, tetapi Beijing juga membuat maritim delimitasi di Teluk Tonkin (2002) dengan Vietnam, dan pada tahun 2005 dengan Filipina dan Vietnam.

Oleh karena itu, meningkatkan peran PLA di bawah Xi Jinping, seperti dijelaskan di atas, tentunya memberikan dampak bagi ASEAN karena sengketa Laut Cina Selatan masih belum terselesaikan. Itu Kongres PKC ke-18 telah mengklasifikasi ulang Laut Cina Selatan sebagai kepentingan inti nasional. Secara bersamaan, ada beberapa



indikasi tumbuhnya ketegasan China di Selatan Laut China di bawah Xi Jinping. Pertama, China aktif melakukan latihan militer di Selatan Laut China untuk memperkuat klaimnya. China secara teratur mengirim kapal patroli ke daerah tersebut dan bahkan telah membangun pos militer dan lapangan terbang di beberapa pulau. Langkah-langkah ini meningkatkan ketegangan regional, terutama setelah deklarasi sepihak China tentang Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) di Laut Cina Timur. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa China akan melakukan hal serupa deklarasi tentang Laut Cina Selatan (**Panda, 2014**).

Kedua, Cina telah melakukan proyek reklamasi lahan yang luas di Cina Selatan Laut. Namun, pasal 121 Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) menyatakan bahwa pihak mana pun tidak dapat mengklaim fitur terendam (seperti beting) dan bahwa "batuan yang" tidak dapat menopang tempat tinggal manusia atau kehidupan ekonomi mereka sendiri tidak akan memiliki eksklusif zona ekonomi atau landas kontinen" (PBB, n.d). Cina sekarang sedang membangun pulau-pulau baru di lima terumbu yang berbeda dan menciptakan kondisi untuk mempertahankan tempat tinggal manusia untuk mendukung klaimnya (Tiezzi, 2014). Pada Januari 2014, reklamasi lahan besar-besaran dilakukan di Johnson South Reef (Wingfield-Hayes, 2014). Reklamasi lahan tambahan juga sedang dilakukan di Woody Island, Pulau Duncan, dan Pulau Drummon, disertai infrastruktur (Lee, 2015). Menurut to Tiezzi (2014), Johnson South Reef akan menjadi rumah bagi pangkalan udara baru di Laut Cina Selatan.

Ketiga, kehadiran besar kapal China di Malaysia, Vietnam, dan Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sejak 2014, China menunjukkan niatnya untuk menempatkan Haiyang Anjungan minyak Shiyou-981 di lokasi dalam ZEE Vietnam. Sementara ini memicu protes anti-China besar-besaran di Hanoi, setelah hampir dua bulan, pada 16 Juli 2014, China National Petroleum Corp akhirnya menutup rig dan memindahkannya lebih dekat ke Pulau Hainan di selatan Cina. Kehadiran China di ZEE Indonesia ditunjukkan dengan perambahan berulang kali ke perairan Kepulauan Natuna yang terus muncul kembali sejak tahun 2009. Kehadiran Cina di Laut Natuna telah berlanjut hingga Desember 2019, ketika kapal penangkap ikan dan pantai China kapal penjaga



memasuki perairan utara Laut Natuna. Menteri Luar Negeri Indonesia Mendagri, Retno L.P. Marsudi, pada 3 Januari 2020, mengeluarkan empat poin sikap Indonesia mengenai klaim China di Laut Natuna, diikuti oleh Presiden Indonesia Joko Widodo ke Laut Natuna. Kehadiran ini bahkan dilakukan selama Coronavirus Pandemi global penyakit-19 (COVID-19). Pada April 2020, sebuah kapal survei pemerintah China, Haiyang Dizhi 8, ditemani oleh kapal Penjaga Pantai China, memasuki ZEE Malaysia dan beroperasi dekat dengan kapal pengeboran di bawah kontrak dengan perusahaan minyak negara Malaysia Petronas (**Latiff dan Ananthalakshmi, 2020**).

Keempat, China menunjukkan tindakan agresif terhadap kapal penangkap ikan penuntut lainnya. Di Maret 2014, China memblokir dua kapal sipil yang disewa oleh angkatan laut Filipina untuk dikirim logistik ke Unit Marinir Filipina yang ditempatkan di Second Thomas Shoal. Beting yang disengketakan ini di Kepulauan Spratly terletak 200 km dari Kepulauan Kalayaan-Filipina Barat dan memiliki telah diklaim sebagai bagian dari landas kontinen Filipina. Pada tahun 2016, terdapat tiga kejadian di Maret, Mei, dan Juni antara kapal patroli Indonesia dan kapal nelayan China penangkapan ikan di ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna.

Secara keseluruhan, kepemimpinan dan visi Xi Jinping tentang China Dream fokus pada militer diplomasi sebagai alat utama untuk memajukan tujuan diplomatiknya. Dengan demikian, kita dapat berargumen bahwa ia memiliki menciptakan setidaknya dua dampak besar bagi ASEAN. Pertama, perkembangan ini telah menyebabkan pertumbuhan rasa ketegasan, terutama di Laut Cina Selatan, yang dianggap sebagai inti nasional minat. Sementara ketegasan yang tumbuh telah menyebabkan hubungan yang tidak nyaman antara China dan beberapa negara ASEAN, diplomasi militer China yang memiliki pendekatan berbeda dengan ASEAN, telah menghasilkan 'negosiasi berkelanjutan tanpa kemajuan' untuk sengketa Laut Cina Selatan. Kedua, meskipun China terus meningkatkan diplomasi militernya dengan negara-negara tetangga, Xi Jinping pada dasarnya tetap tidak berubah dari tradisi 'tautan horizontal'. preferensi Cina untuk diplomasi bilateral dapat dilihat sebagai indikator 'mentalitas kekuatan besar' yang menentang bersekutu karena dianggap sebagai kebijakan yang diambil oleh



negara kecil. Sementara itu, 'tautan horizontal' tradisi lebih suka mencari perjanjian aliansi satu per satu dengan pihak lawannya dengan menggunakan metode membagi-dan-menaklukkan. Oleh karena itu, hingga saat ini, China sengaja mempertahankan berbagai derajat diplomasi militer bilateral dengan beberapa negara anggota ASEAN.

5. Kesimpulan

Meningkatnya peran militer dalam kebijakan luar negeri China telah dimungkinkan sejak Xi Jinping melakukan perubahan strategis dengan menekankan urusan luar negeri terkait keamanan nasional. Penekanan pada keamanan nasional tidak lepas dari ciri khas pemerintahannya: 'Impian China', yang terpancar dari semangat nasionalisme peremajaan nasional. Ini adalah alat untuk mencapai impian alih-alih menghidupkan kembali pasukan yang kuat.

Namun, kepentingan Xi Jinping dan militer saling terkait. Xi Jinping membutuhkan dukungan untuk legitimasi kepemimpinannya dari militer sebagai pilar utama kekuatan PKC. Sebaliknya, militer, terutama mereka yang tidak senang dengan kelemahan kebijakan luar negeri warga sipil, berusaha memainkan peran yang lebih berpengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri China. Sementara peran militer yang berkembang di bawah Xi Jinping lebih pada kepentingan domestik kedua aktor, hal itu berdampak pada seluruh kebijakan luar negeri China. Pertama, bujukan militer dan dukungan penuh terhadap perubahan telah memastikan Xi Jinping melakukan pendekatan yang lebih ketat untuk melindungi keamanan nasional China. Kedua, meningkatnya peran militer dalam pembuatan kebijakan luar negeri terkait keamanan nasional telah membuat kebijakan ini seolah-olah hanya keputusan militer taktis. Sementara ketegasan telah menjadi identifikasi kebijakan luar negeri Xi Jinping, ia harus dengan hati-hati menghitung kecenderungan yang berkembang ini kecuali jika itu hanya akan menempatkan China dalam situasi geopolitik yang sangat negatif (Ji, 2014a).



Secara keseluruhan, kepemimpinan dan visi Xi Jinping tentang China Dream, yang menggunakan diplomasi militer sebagai alat utama untuk memajukan seluruh tujuan diplomatiknya, telah dilihat sebagai tanda tumbuhnya ketegasan. Dalam hal ini, sengketa Laut China Selatan dianggap sebagai kepentingan inti nasional. Sementara meningkatnya ketegasan telah menyebabkan hubungan yang tidak nyaman antara China dan beberapa negara ASEAN, diplomasi militer China, yang memiliki pendekatan berbeda dengan ASEAN, telah menghasilkan 'negosiasi tanpa kemajuan' untuk sengketa Laut Cina Selatan.

6. Ucapan Terimakasih

Tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. karena kebaikan dan kasih sayang banyak orang. Saya ingin menunjukkan penghargaan saya kepada Profesor A.A. Banyu Perwita, Ph.D., yang telah memberikan nasehat dan bimbingan tugas hingga selesai. Saya juga dengan rendah hati mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan dorongan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yaitu: Teknisi di Pusdiklat Bahasa dan Guru Besar di UNHAN RI. Kepada keluarga saya, saya akan mengatakan bahwa kekuatan dan inspirasi untuk menjadi prajurit dalam studi master saya berasal dari Anda. Kesabaran, kesabaran, dan kata-kata penyemangat Anda akan tertanam dalam ingatan saya selamanya. Saya dengan sepenuh hati mendedikasikan kontribusi kecil yang akan diberikan pekerjaan ini kepada mereka yang pekerjaannya memfasilitasi perdamaian.

Daftar Pustaka

Allen, K., Saunders, P. C., and Chen, J. (2017). *Chinese Military Diplomacy 2003-2016: Trends and Implications*. Washington DC: National Defense University Press.

ASEAN. ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM). <https://asean.org/asean-political-security-community/asean-defence-ministers-meeting-admm/>

Cai, P. (2016). ASEAN's defence diplomacy and China's military diplomacy. *Asia Policy*, 22, 89-95. <http://dx.doi.org/10.33172/jp.v5i1.487>



Cameron, F. (2013, 15 November). China's foreign policy under the new leadership – More continuity than change. Eu-Asia Centre. http://www.eu-asiacentre.eu/pub_details.php?pub_id=124

Chang, F. K. (2015, 27 May). Strategic intentions: China's military strategy white paper. Foreign Policy Research Institute. <http://www.fpri.org/2015/05/strategic-intentions-chinas-military-strategy-white-paper/>

China to build landing ship for Thai navy. (2019, 17 September). The Strait Times. <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/china-to-build-landing-ship-for-thai-navy>

Gady, F. S. (2015, 26 May). China to embrace new 'Active Defense' strategy. The Diplomat. <http://thediplomat.com/2015/05/china-to-embrace-new-active-defense-strategy/>

Gore, L. L. P. (2013). China's New Foreign Policy Team. *East Asian Policy: An International Quarterly*, 5(3), 5 – 17.

Grieger, G. (2015, June). The role of army in China's politics. European Parliamentary Research Service. [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564375/EPRS_BRI\(2015\)564375_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564375/EPRS_BRI(2015)564375_EN.pdf)

Heydarian, R. J. (2020). *The Indo-Pacific: Trump, China, and the New Struggle for Global Mastery*. Singapore: Palgrave Macmillan: Singapore.

Huang, C. (2013). *Change Agent or Steady as She Goes? In South China Morning Post. The China Renaissance the Rise of Xi Jinping and the 18th Communist Party Congress*. Singapore: World Scientific Publishing.